

**ACCOUNTING STUDY PROGRAM, FACULTY OF ECONOMICS, ADVENT
INDONESIA UNIVERSITY BANDUNG**

**KONTRIBUSI PKB DAN BBNKB BAGI PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT**

Michellavanessa Pandingan¹, Joan Yuliana Hutapea²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia Bandung^{1,2}
2032069@unai.edu¹

ABSTRACT

Local Taxes are one of the local government revenues that is beneficial for financing and developing a region. Each region has revenues that sometimes result in inequality in the development of an area, due to differences in the potential of each region. Local tax revenue is one of the largest contributors to Local Own-Source Revenue (PAD). This study aims to retest the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) and Tax of Transfer Vehicle Ownership (BBNKB) to local taxes revenue in West Java Province in 2015-2022. This study used quantitative methods with a causal associative analysis process. Statistical data processing uses descriptive analysis, correlation and determination efficiency, regression and significance tests from data on the realization of PKB, BBNKB and local taxes revenues. The results of observations based on statistical analysis show that local taxes are influenced by PKB (sig. 0.00 < 0.05) but not by BBNKB (sig. 0.06 > 0.05). Simultaneously, local taxes are affected by PKB and BBNKB (sig. 0.00 < 0.05).

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Of Transfer Vehicle Ownership, Local Taxes, West Java

ABSTRAK

Pajak Daerah menjadi salah satu penerimaan pemerintah daerah yang bermanfaat bagi pembiayaan dan pengembangan suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki penerimaan yang kadang mengakibatkan adanya ketimpangan pengembangan suatu daerah, karena perbedaan potensi yang dimiliki tiap daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan proses analisis asosiatif kausal. Pengolahan data statistik menggunakan analisis deskriptif, koefisien korelasi dan determinasi, regresi dan uji signifikansi dari data realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan penerimaan pajak daerah. Hasil pengamatan berdasarkan analisis statistik menghasilkan bahwa pajak daerah dipengaruhi oleh PKB (sig. 0,00 < 0,05) tapi tidak oleh BBNKB (sig. 0,06 > 0,05). Secara bersamaan, pajak daerah dipengaruhi oleh PKB dan BBNKB (sig. 0,00 < 0,05).

Kata Kunci: PKB, BBNKB, Pajak Daerah, Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Barat menjadi sebuah provinsi yang memiliki kenangan yang sangat unik, dimana ibu kota provinsi Jawa Barat mengalami beberapa kali perpindahan. Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota. Perekonomian Jawa Barat didominasi dengan dunia manufaktur yang bergerak di bidang elektronik, kulit hingga pesawat. Namun produk yang paling dikenal dari Jawa Barat adalah dari sektor garmen (Wikipedia, 2024)

Penduduk yang ada di Jawa Barat berada pada kisaran 49 juta dengan tingkat angkatan kerja sebanyak 65% dari jumlah penduduk (BPS, 2022). Jumlah angkatan kerja yang cukup besar ini membuat setiap penduduk membutuhkan kendaraan bermotor untuk memperlancar mobilitasnya. Pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan akan kendaraan bermotor. Banyak jumlah kendaraan bermotor berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Penerimaan

pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (Suparmoko, 2002).

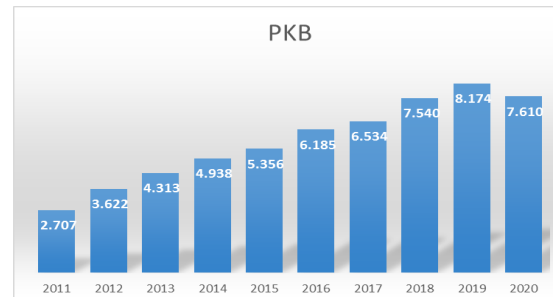
Berdasarkan angka yang diberikan oleh Bapenda Jabar diapati bahwa penerimaan PKB sebesar 27% dari pendapatan daerah (PD) dan 38% dari pendapatan asli daerah Jawa Barat (PAD) di tahun 2022. Besarnya penerimaan BBNKB di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menghasilkan angka 25% dari PAD dan 18% dari PD Provinsi Jawa Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Kontribusi PKB dan BBNKB tahun 2022

No	Nama	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	41%	38%	27%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	27%	25%	18%

Sumber: Bapenda Jabar yang diolah oleh penulis, 2024

PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah dari tiga penerimaan lainnya yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Di tahun 2022, Pajak Daerah adalah sebesar 93% dari PAD Provinsi Jawa Barat dan atau 65% dari total penerimaan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat. PKB dan BBNKB memiliki angka penerimaan yang paling tinggi yang didapat murni dari hasil penerimaan lokal daerah itu sendiri. Penerimaan tertinggi lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat. Penggunaan dana dari penerimaan pajak ini biasanya digunakan untuk subsidi, bantuan sosial maupun belanja operasional lainnya (BPS, 2021).



Gambar 1. Penerimaan PKB (dalam milyar)

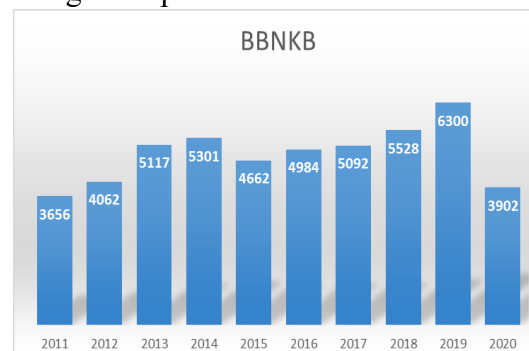
Sumber: Bapenda Jabar, 2024



Gambar 2. Pertumbuhan PKB (%)

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Gambar 1 di atas adalah penerimaan PKB sepanjang tahun 2011-2020, dimana terlihat terjadi peningkatan penerimaan PKB dari tahun ke tahun yang cukup stabil. Perbedaan perubahan penerimaan yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Di tahun tersebut penerimaan PKB tidak dapat menyamai tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan PKB dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan target capaian yang diperoleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada gambar 2, target capaian penerimaan PKB justru cenderung terus mengalami penurunan.



Gambar 3. Penerimaan BBNKB (dalam milyar)

Sumber: Bapenda Jabar, 2024



Gambar 4. Pertumbuhan BBNKB (%)

Sumber: Bapenda Jabar, 2024

Selanjutnya dapat kita lihat adanya peningkatan penerimaan BBNKB di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2020. Perubahan penerimaan yang bervariasi, terdapat kenaikan dan penurunan tingkat penerimaan BBNKB (Gambar 3). Untuk target capaian penerimaan BBNKB juga tidak jauh berbeda dengan penerimaan PKB, dimana menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi target penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pajak daerah menjadi salah satu sumber penting dari tiga sumber penerimaan lainnya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan daerah dalam rangka terwujudnya kemandirian keuangan dan pengembangan daerahnya masing-

masing demi terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk lebih mendalami PKB dan BBNKB yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan memilih judul penelitian Kontribusi PKB dan BBNKB bagi Provinsi Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi pada tiap tahun anggaran, dapat terlihat penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi. Di dalam APBD provinsi tercantum adanya sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan negara dari penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak daerah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (BPS, 2021).

Penggunaan pajak daerah dimanfaatkan untuk belanja daerah, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berbagai macam belanja yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dari hasil pendapatan daerah. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (BPS, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu fungsi pajak guna mengatur pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengatur dan mengendalikan kebijaksanaan pajak, menaikkan atau menurunkan pajak dan melakukan verifikasi pajak. (Mulyawan and Novia 2016). Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda serta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air yang diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin dan dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia (BAPENDA JABAR 2023).

PKB dan Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan dari Pajak Daerah suatu provinsi yang dikelola daerah dan dimanfaatkan seefektif dan efisien mungkin untuk pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2020) di Jawa Barat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dipengaruhi oleh PKB. Hasil ini didukung oleh penelitian Ananda & Idris (2023) di Lampung yang memberikan hasil yang tidak berbeda. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan PAD dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik yaitu pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan PAD. Oleh sebab itu, penulis mengambil satu kesimpulan sementara atas penelitian ini sebagai berikut:

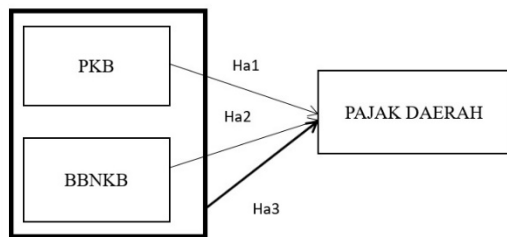
Hal 1 : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh PKB

BBNKB dan Pajak Daerah

Sumber penerimaan pajak daerah yang lain adalah berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan terjadinya tingkat transaksi perubahan kepemilikan atas kendaraan bermotor juga tinggi. Oleh sebab itu, BBNKB juga diharapkan mampu menjadi kontributor yang tidak dapat dipandang sebelah mata bagi penerimaan PAD. Penelitian yang dilakukan Ferdiansyah (2020) menghasilkan PAD dipengaruhi oleh

BBNKB. Penelitian ini juga didukung oleh Pangesti (2020) yang melakukan penelitian atas PAD di Jawa Tengah dan menghasilkan adanya signifikansi pengaruh atas BBNKB terhadap PAD di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan PAD dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik yaitu pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan PAD. Oleh sebab itu, penulis mengambil satu kesimpulan sementara atas penelitian ini sebagai berikut:

Ha2 : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh BBNKB



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

PKB, BBNKB dan Pajak Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari beberapa kelompok pembagian pendapatan. Pajak daerah menjadi salah satu sumber elemen penerimaan pajak asli daerah. PKB dan BBNKB menjadi harapan pemerintah daerah provinsi untuk berkontribusi bagi daerah dalam penerimaan pajak daerah yang pemanfaatannya dilakukan bagi pemerataan pembangunan dan perekonomian daerah. Beberapa penelitian telah dilakukan dan menghasilkan bahwa PAD dipengaruhi oleh PKB dan BBNKB (Ferdiansyah, 2020; Pangesti, 2020; Ananda & Idris, 2023). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sementara sebagai berikut :

Ha3 : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh PKB dan BBNKB

METODE PENELITIAN

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif ini didapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan data penerimaan tentang target dan realisasi PKB dan BBNKB yang diperoleh sejak tahun 2011 hingga 2020. Namun penelitian ini berfokus pada jumlah target dan realisasi PKB, BBNKB dan pajak daerah tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini membahas kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel bebas terhadap penerimaan pajak daerah sebagai variabel terikat.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilengkapi dengan analisis korelasi, determinasi dan uji signifikansi. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana semua data yang diperoleh dari Bapenda Jabar diolah dalam penelitian ini. Semua variabel diukur dengan menggunakan skala pengukuran rasio dalam milyaran rupiah.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,01% – 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup baik
40,01% - 50,00%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari : 2011)

Tabel 2 di atas menjadi kriteria alat ukur kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB pada penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Upaya strategis yang dilakukan pemerintah adalah adanya pembangunan

daerah yang dikelola dengan cara yang handal dan profesional. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi dilakukan di pemerintah kota dan kabupaten, sehingga tercapai tujuan pembangunan daerah yaitu kemajuan perekonomian daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan penerimaan PAD demi tercapainya kemandirian daerah dan pemerataan kemajuan seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Gambaran umum tentang penerimaan PKB, BBNKB dan pajak daerah yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Barat ada dalam tabel 2 berikut ini. Penerimaan PKB sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Namun terjadi penurunan penerimaan PKB di tahun 2020 yang kemudian mulai menanjak naik kembali. Hal yang sama ini terjadi juga di penerimaan BBNKB, dimana di tahun 2020 terjadi penurunan yang lebih tajam dibanding penurunan PKB di tahun 2020. Pertumbuhan penerimaan BBNKB setelah tahun 2020 merangkak naik lebih lambat dibandingkan peningkatan penerimaan PKB. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya hal yang tidak jauh berbeda dengan penerimaan pajak daerah. Periode 2020 pajak daerah juga mengalami penurunan, namun berhasil naik kembali di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB dan Pajak Daerah (milyar)

Keterangan	PKB	BBNKB	PD
2015	5.355	4.662	14.617
2016	6.185	4.984	15.549
2017	6.534	5.092	16.483
2018	7.540	5.527	18.153
2019	8.174	6.300	19.626
2020	7.610	3.902	17.035
2021	8.179	5.161	18.847
2022	8.900	5.851	21.542

Mean	7.309	5.184	17.731
Standard Deviation	1.186	734	2.268
Minimum	5.355	3.902	14.617
Maximum	8.900	6.300	21.542
Count	8,00	8,00	8,00

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

Penerimaan PKB terendah terjadi di tahun 2015 dengan nilai sebesar 5,35 triliun rupiah, sedangkan penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan nilai sebesar 8,9 triliun rupiah. Rata-rata penerimaan PKB sepanjang tahun pengamatan adalah sebesar 7,3 triliun dengan rentang baku sekitar 1,18 triliun rupiah. Sepanjang 8 tahun pengamatan, terdapat 5 tahun penerimaan PKB yang berada di atas rata-rata penerimaan PKB, yaitu di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Penerimaan BBNKB terendah terjadi di tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,9 triliun rupiah, sedangkan penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan nilai sebesar 6,3 triliun rupiah. Rata-rata penerimaan BBNKB sepanjang tahun pengamatan adalah sebesar 5,18 triliun dengan rentang baku sekitar 734 milyar rupiah. Kebalikan dengan yang terjadi dengan penerimaan PKB, penerimaan BBNKB justru terdapat 5 tahun yang berada di bawah rata-rata. Hanya ada 3 tahun yang penerimaan BBNKB nya yang berada di atas rata-rata, yaitu tahun 2018, 2019 dan 2022.

Penerimaan pajak daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak daerah terendah terjadi di tahun 2015 dengan nilai sebesar 14,61 triliun, sedangkan penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan nilai sebesar 21,54 triliun rupiah. Rata-rata penerimaan pajak daerah sepanjang periode pengamatan adalah sebesar 17,73 triliun rupiah. Sepanjang periode penelitian, terdapat 4

tahun penerimaan pajak daerah di atas rata-rata dan sisanya di bawah rata-rata. Penerimaan pajak daerah di atas rata-rata terjadi di tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022.

Kontribusi PKB pada Pajak Daerah

Penerimaan PKB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari nilai *Multiple R* yaitu sebesar 0,9582. Nilai korelasi ini adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan penerimaan PKB akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ditentukan oleh penerimaan PKB sebesar 91,82% atau *R Square* 0,9182. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah sebanyak 8,18% dipengaruhi oleh faktor lain selain penerimaan PKB.

Tabel 4. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi PKB

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,958262039
R Square	0,918266136
Adjusted R Square	0,904643825
Standard Error	700,6605776
Sign	0,000176132
Observations	8

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah positif signifikan dipengaruhi oleh penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari nilai sign. $0,000176 < 0,05$, sehingga H_0 diterima dan menolak H_1 .

Dengan menggunakan data yang didapat dari BAPENDA Jawa Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Barat secara detail per tahunnya.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015-2022

Tahun	PKB (Milyar)	PD (Milyar)	Kontribusi (%)	Klasifikasi
2015	5.355	14.617	36,64	Cukup baik
2016	6.185	15.549	39,78	Cukup baik
2017	6.534	16.483	39,64	Cukup baik
2018	7.540	18.153	41,54	Baik
2019	8.174	19.626	41,65	Baik
2020	7.610	17.035	44,67	Baik
2021	8.179	18.847	43,40	Baik
2022	8.900	21.542	41,31	Baik

Sumber: Bapenda Jabar yang diolah oleh penulis, 2024

Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PKB menunjukkan kontribusi yang cukup baik pada penerimaan pajak daerah pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Setelah periode tersebut terjadi peningkatan, dimana penerimaan PKB menunjukkan kontribusi yang baik pada penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2022, walaupun terdapat penurunan kontribusi di tahun 2022. Rata-rata kontribusi penerimaan PKB pada pajak daerah adalah sebesar 41%.

Kontribusi BBNKB pada Pajak Daerah

Penerimaan BBNKB memiliki hubungan yang kuat dengan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari nilai *Multiple R* yaitu sebesar 0,6727. Nilai korelasi ini adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan penerimaan BBNKB akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ditentukan oleh penerimaan BBNKB sebesar 45,26% atau *R Square* 0,4526. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah sebanyak 54,74% dipengaruhi oleh faktor lain selain penerimaan BBNKB.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah positif tidak signifikan dipengaruhi oleh penerimaan BBNKB di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari nilai sign. $0,067514 >$

0,05, sehingga H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Tabel 6. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi BBNKB

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,67275718
R Square	0,45260222
Adjusted R Square	0,36136926
Standard Error	1813,25206467
Sign	0,06751447
Observations	8

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024.

Dengan menggunakan data yang didapat dari BAPENDA Jawa Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Barat secara detail per tahunnya.

Tabel 7. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015-2022

Tahun	BBNKB (Milyar)	PD (Milyar)	Kontribusi (%)	Klasifikasi
2015	4.662	14.617	31,89	Cukup baik
2016	4.984	15.549	32,05	Cukup baik
2017	5.092	16.483	30,89	Cukup baik
2018	5.527	18.153	30,45	Cukup baik
2019	6.300	19.626	32,10	Cukup baik
2020	3.902	17.035	22,91	Sedang
2021	5.161	18.847	27,38	Sedang
2022	5.851	21.542	27,16	Sedang

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024.

Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan BBNKB menunjukkan kontribusi yang cukup baik pada penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 hingga 2019. Setelah periode tersebut justru terjadi penurunan tingkat kontribusi BBNKB pada pajak daerah. Penerimaan BBNKB menunjukkan kontribusi sedang pada penerimaan pajak daerah sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Rata-rata kontribusi

penerimaan PKB pada pajak daerah adalah sebesar 29%.

Kontribusi PKB dan BBNKB pada Pajak Daerah

Penerimaan PKD dan BBNKB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari nilai *Multiple R* yaitu sebesar 0,9852. Nilai korelasi ini adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan penerimaan PKB dan BBNKB akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ditentukan oleh penerimaan PKD dan BBNKB sebesar 97,07 % atau *R Square* 0,9707. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah sebanyak 2,93% dipengaruhi oleh faktor lain selain penerimaan PKB dan BBNKB.

Tabel 8. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi PKB dan BBNKB

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,985225
R Square	0,970669
Adjusted R Square	0,958936
Standard Error	459,794200
Sign	0,000147
Observations	8

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah positif signifikan dipengaruhi oleh penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari nilai sign. $0,000147 < 0,05$, sehingga H_0 diterima dan menolak H_0 .

Dengan menggunakan data yang didapat dari BAPENDA Jawa Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Barat secara detail per tahunnya.

Tabel 9. Kontribusi PKB dan BBNKB tahun 2015-2022

Tahun	PKB & BBNKB (Milyar)	PD (Milyar)	Kontribusi (%)	Klasifikasi
2015	10.017	14.617	69	Sangat baik
2016	11.169	15.549	72	Sangat baik
2017	11.626	16.483	71	Sangat baik
2018	13.067	18.153	72	Sangat baik
2019	14.474	19.626	74	Sangat baik
2020	11.512	17.035	68	Sangat baik
2021	13.340	18.847	71	Sangat baik
2022	14.751	21.542	68	Sangat baik

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024.

Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PKB dan BBNKB menunjukkan kontribusi yang sangat baik pada penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 hingga 2022. Rata-rata kontribusi penerimaan PKB pada pajak daerah adalah sebesar 70,43%.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi PKB pada pajak daerah adalah sebesar 41%, sedangkan kontribusi BBNKB hanya sebesar 29%. Total rata-rata kontribusi PKB dan BBNKB pada penerimaan pajak daerah adalah sebesar 70%.

PKB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak daerah dan memiliki hubungan yang positif. PKB memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan penerimaan pajak daerah. BBNKB memiliki hubungan yang positif dan sedang dengan penerimaan pajak daerah. Namun, BBNKB memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PKB dan BBNKB menghasilkan hubungan positif yang sangat kuat. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa perubahan

penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh penerimaan PKB dan BBNKB.

SARAN

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap masyarakat wajib pajak agar tetap menjaga konsistensi dalam melakukan pembayaran pajak. Peneliti juga berharap agar sumber pendapatan lainnya dimanfaatkan secara optimal agar bisa meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Serta berharap pemerintah juga dapat tetap menjaga integritas sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan untuk taat dalam membayar pajak yang merupakan sumber pendapatan negara dan penulis juga berharap agar pemerintah dapat menjalin kerjasama anatar daerah atau dengan sektor swasta untuk proyek-proyek yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPENDA JABAR. 2023. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
<https://bapenda.jabarprov.go.id/bea-balik-nama-kendaraan-bermotor/>.
- BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT. 2023. "Data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor periode 2015-2022."
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMP YKPN.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2022). *Provinsi Jawa barat Dalam Angka (Jawa Barat Province in Figures 2022)*.
- BPS. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN. n.d.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=a-pa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.
- Ferdiansyah.(2020). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan*

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140. DOI: [10.25273/inventory.v4i2.7671](https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671)
- Karina, Nurul, and Novi Budiarto. 2016. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO." *EMBA* 4 (1). file:///C:/Users/Hp/Downloads/iogi2018,+10_Nurul+Karina_Ak.pdf.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. n.d. *Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>.
- Mulyawan, Ali, and Dini Novia. 2016. "APLIKASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ONLINE BEBASIS WEB (STRUDI KASUS DI SAMSAT SOREANG KAB. BANDUNG)." *Journal Computech & Bisnis* 10 (1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=568448&val=7183&title=Aplikasi%20Pembayaran%20Pajak%20Kendaraan%20Bermotor%20Online%20Berbasis%20Web%20Studi%20Kasus%20Di%20Samsat%20Soreang%20Kab%20Bandung>.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. "ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 4-6. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/22844/15488.
- Pengesti, N.A. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (2020) Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Pancasakti, Tegal. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075179.pdf>
- Situmorang, Christina Verawaty, Emma Rosinta Br. Simarmata, and Bilfrid Asyaria Simanullang. 2018. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG." *Jurnal Ilmiah Smart* 1-9. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>.
- Tumuli, Kevin F, George M. V. Kawung, and Jaclien I Sumual. 2021. "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA." *Jurnal Berkala Ilmiah* 21 (2): 121-129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/35748>.
- World Heath Organization. 2020. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.
- Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (2): 1-5. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/179/139>.
- [Jawa Barat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)